

MENJADI OPOSISI ITU TERHORMAT

Oleh Nurcholish Madjid

Melihat perkembangan masyarakat sekarang ini, rupanya kita masih dikuasai oleh kerangka berpikir “feodalisme absolut”, yang wujudnya antara lain, adanya dambaan menjadi priyayi. Anak dikirim ke sekolah supaya suatu saat dapat menjadi priyayi, menjadi “*wong pangkat*”.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan sekalipun ide tentang oposisi sudah ditanamkan sejak beberapa tahun lalu, tetapi ketika momen itu tiba, misalnya dalam Sidang Umum MPR yang lalu, tidak mendapat responsi yang wajar. Ternyata masih banyak orang yang ingin menjadi priyayi: masuk kabinet, mendapat pangkat, dan seterusnya. Apalagi dalam keadaan di mana ada kesejajaran yang sangat mengkhawatirkan di negeri kita ini: antara jabatan dan kekayaan. Menjabat berarti menjadi kaya. Godaan menjabat itu menjadi gabungan antara godaan takhta dan harta.

Melihat gejala yang sangat mengkhawatirkan ini, sudah seharusnya kita terus-menerus menanamkan kembali ide mengenai oposisi sampai tiba saatnya di mana seseorang merasa terhormat menjadi oposisi; merasa terhormat berada di luar pemerintahan; dan merasa terhormat tidak mempunyai derajat atau pangkat seperti yang dipahami dalam masyarakat yang dijiwai oleh feodalisme absolut itu.

Oposisi tidak perlu dipahami sebagai sikap menentang (*to oppose* memang berarti menentang), sebab dalam oposisi kita ada

pula segi *to support*-nya, sehingga dalam konteks politik, oposisi lebih merupakan kekuatan penyeimbang, suatu *check and balance*, yang bisa membuat perasaan-perasaan tersumbat tersalurkan.

Pada dasarnya, perlunya oposisi bisa dimulai dengan suatu postulat yang sederhana sekali, yaitu bahwa masalah sosial dan politik tidak bisa dipertaruhkan dengan iktikad baik pribadi — betapa pun klaim orang itu mempunyai iktikad baik, sebab yang dipertaruhkan adalah kehidupan orang banyak. Dan kalau sesuatu itu sudah bersifat sosial yang menyangkut orang banyak, maka itu harus dipersepsi, dipahami, dan dipandang sebagai persoalan yang terbuka, di mana partisipasi menjadi suatu bentuk keharusan. Salah satu bentuk partisipasi adalah oposisi, yakni suatu kegiatan sosial-politik yang mengingatkan, jangan sampai kita menjadi korban yang fatal untuk suatu kenyataan yang sederhana: bahwa manusia itu selalu bisa salah.

Kini kita sudah berhasil memasuki tahap paling penting dalam kehidupan sosial-politik, yaitu memasuki transisi menuju demokrasi. Tetapi, dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya, ini merupakan tahap paling sulit, karena menuntut banyak sekali persyaratan, yang apabila kita renungkan akan terdengar sebagai klise, bahkan streotipe, seperti misalnya perlunya kedewasaan politik, kesanggupan menerima perbedaan, dan menyelesaikan perbedaan itu di dalam batas-batas keadaban politik, bahkan keadaban itu sendiri. Seperti pluralisme misalnya — yang merupakan kondisi paling penting bagi demokrasi — suatu rumusan pernah saya baca, “Pluralisme haruslah dipahami sebagai ‘pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban’ (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*)”.

Artinya, pluralisme adalah suatu tatanan masyarakat di mana kita harus bersedia untuk terlibat dalam keanekaragaman, dan menyelesaikan persoalan itu dengan suatu keadaban. Oleh karena itu, ironi yang cukup mengkhawatirkan dalam perkembangan politik kita dalam rangka demokrasi ini adalah meluasnya *mob-politics* (politik tawurnn). Ketika orang tidak biasa, atau belum

terlatih, menyelesaikan suatu dengan wacana akal, ia lari ke *okol*. Daripada berdebat susah-susah, dengan kemungkinan kalah, sudah tawuran saja!

Padahal, demokrasi tidak bisa didukung oleh *mob-politics* seperti itu. Memang, *mob-politics* bukan suatu kejahatan — tidak seperti *money politics* — tetapi jelas itu merupakan keterbelakangan politik, suatu keadaan yang kurang maju. Dan kita tidak usah berkecil hati dengan penilaian seperti itu, karena kita ini memang bangsa baru. Keindonesiaan merupakan suatu produk modern, yang masih harus kita bentuk.

Demokrasi Indonesia masih dalam proses pertumbuhan. Dan dalam proses seperti ini, demokrasi — suatu hal yang juga masih abstrak bagi kebanyakan kita — bukanlah suatu kategori statis, melainkan suatu kategori dinamis yang tumbuh melalui pengalaman yang jelas sekali mengandung persoalan coba-salah dan coba-salah. Salah satu kelemahan Pak Harto, ia merupakan tipe orang yang tidak bersedia menerima risiko salah, sehingga cara berpikirnya “jangan ambil risiko”, dan akibatnya seluruh kesalahan terakumulasi dan meledak setelah 30-an tahun, sampai tidak bisa terkontrol.

Oleh karena itu, yang sekarang kita alami, dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, adalah suatu demokrasi di mana unsur coba-salahnya dominan, dan salahnya memang terlihat banyak sekali. Maka, upaya yang dapat kita lakukan sekarang dengan oposisi adalah bagaimana agar kesalahan itu tidak fatal, khususnya agar tidak membatalkan seluruh proses demokratisasi ini.

Dengan demikian tepat sekali, yang kita maksudkan dengan oposisi bukanlah oposisi seperti dalam masyarakat atau negara yang menganut sistem parlementer, yang agaknya obsesi partai oposisi di situ adalah menjatuhkan pemerintah. Saya kira, oposisi kita tidak demikian. Kiranya kita perlu memberi apresiasi kepada *founding fathers* kita bahwa mereka mencoba mencontoh Amerika Serikat, yaitu suatu sistem politik yang dipimpin oleh kabinet presidensial

periodik (di Amerika 4 tahun, di Indonesia 5 tahun). Artinya, pemerintah tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan.

Lalu apa peran oposisi itu dalam kaitan dengan kemungkinan menyudahi suatu pemerintahan? Yang paling dramatis adalah jika sampai terjadi *impeachment*, tetapi yang normal adalah memastikan bahwa dalam periode yang akan datang suatu pemerintahan yang tidak kredibel tidaklah perlu dipilih lagi.

Karena kita baru bereksperimen dengan demokrasi, yang *nota-bene* belum ada contohnya dalam sejarah kita, maka janganlah kita berharap bahwa semua hal akan selesai dengan segera. Kita harus bersabar dan bersedia menunda kesenangan sementara, termasuk dalam menilai kepemimpinan presiden kita.

Kita harus selalu ingat, inilah presiden yang pertama kali terpilih secara demokratis, dengan pemilunya yang pertama kali jujur, dalam suatu bangsa yang besar, yang kalau melihat ukurannya saja begitu besar (sama dengan dari London sampai Teheran, yang meliputi seluruh Eropa Barat-Timur plus Timur Dekat). Kita juga berhasil berproses dari sistem otoriter Orde Baru ke sistem demokrasi yang begitu aman. Dan Gus Dur adalah presiden pertama yang secara sadar memperjuangkan pluralisme dan toleransi, yang pertama sadar akan antikekerasan, dan juga yang pertama sadar bahwa dia mewakili masyarakat secara keseluruhan, walaupun banyak juga kekurangannya.

Nah, persis di sinilah peran oposisi, yakni bagaimana bisa meminimalkan segi-segi kekurangan Gus Dur itu, hingga tibanya pemilu yang akan datang, dengan prinsip menunda kesenangan. Memang menyenangkan menjatuhkan presiden, tetapi dengan itu kita menanam benih konflik yang tidak akan habis-habis.

Oleh karena itu, kesimpulannya: orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, jika tidak terbiasa berpikir alternatif. Untuk itulah, salah satu yang diperlukan adalah lembaga oposisi, yang sebetulnya hanyalah kelembagaan dari suatu keceabderungan yang selalu ada dalam masyarakat, yaitu adanya kelompok yang tidak setuju kepada hal yang mapan.

Dengan adanya kelembagaan oposisi, akan ada pendewasaan politik dan percepatan proses demokratisasi. Bisa saja kita secara optimistis membiarkan proses itu berlangsung secara alami. Tetapi, sesuatu yang dibiarkan menurut proses alam, biasanya tidak terkontrol, karena itulah harus ada *deliberation*, kesengajaan, tidak boleh *by accident*, atau secara kebetulan. Dan melihat visi perkembangan politik Indonesia di masa depan, menjadi oposisi adalah suatu pekerjaan yang sangat terhormat. [❖]